



PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1906/BKD/2019

TANGGAL : 31 Mei 2019

TENTANG

PEMBERKASAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

Menindaklanjuti pengumuman Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 811.3/1785/BKD/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, maka dalam rangka usul penetapan Nomor Induk PPPK, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bakal Calon PPPK yang telah memenuhi kriteria / keterangan "P/L" dinyatakan lulus seleksi, sesuai pengumuman Gubernur diatas, diminta segera melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur NTB ; (format terlampir)
 - b. Fotocopy Ijazah / STTB dan Transkrip Nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH); (bermaterai Rp.6000,-)
 - d. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - e. Surat keterangan berkelakuan baik (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (RESORT setempat sesuai domisili / KTP);
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah (ASLI);
 - g. Surat keterangan bebas NARKOBA dari Dokter Pemerintah (ASLI);
 - h. Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja (ASLI);
 - i. Surat pernyataan yang berisi tentang :
 1. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, atau PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN dan BUMD;
 3. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
 - j. Keputusan pengangkatan sebagai tenaga honorer yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), mulai pengangkatan pertama kali s/d pengangkatan terakhir tahun anggaran 2019.
2. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud angka 1, disampaikan rangkap 2 (dua) kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB (Bidang Mutasi Pegawai) paling lambat **tanggal 14 Juni 2019** (1 rangkap berkas asli dan 1 rangkap berkas copian yang telah dilegalisir).

3. Terkait angka 1 huruf (f) dan huruf (g) :
- a. Untuk pengujian kesehatan jasmani dapat dilakukan antara lain pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB atau Rumah Sakit Umum Kabupaten / Kota sesuai domisili, dan pemeriksaan kesehatan jasmani dilaksanakan pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB atau pada Rumah Sakit Umum Kabupaten / Kota yang memiliki kewenangan.
 - b. Pemeriksaan bebas NARKOBA dapat dilakukan antara lain pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi NTB (Dinas Kesehatan Provinsi NTB) atau Instansi Pemerintah yang menangani pelayanan untuk pengujian Zat NARKOBA pada Provinsi NTB atau Kabupaten / Kota sesuai domisili.
4. Hal-hal yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Contac Person Nomor (RAPIIN 081907583344, KHAERUL HP.081917328446, EDI SUHARMAN HP.0818362604).

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian.

An. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Drs. H. FATHURRAHMAN, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19680629 199303 1006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram.
3. Inspektur Provinsi NTB di Mataram.
4. Peringgal.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, atau PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN dan BUMD;
3. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, atau anggota Kepolosian Negara Republik Indonesia;
4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... ,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp.6000

Mataram, Juni 2019

Perihal : Usul Pengangkatan
Menjadi PPPK

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat
di-
Mataram

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir / Tahun :
Agama :
Jenis kelamin :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar dapat kiranya saya diangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai bahan kelengkapan administrasi, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang disahkan pejabat berwenang
2. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari POLRES/POLRI
5. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran III) Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019
6. Surat Keterangan Pencari Kerja (AK/I)
7. Surat pernyataan (Lampiran IV) Peraturan BKN 1 Tahun 2019.
8. Asli Bukti Registrasi Pendaftaran Online
9. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 lembar

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan harapan dapat diterima, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat saya

Materai Rp.6000,-

(Nama terang)

**PERSYARATAN ADMINISTRASI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K)
PEMERINTAH PROVINSI NTB TAHUN 2019**

1. Surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam (*bermaterai Rp. 6.000,-*)
2. Foto Copy Ijazah/Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang
3. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah (*Asli dan Foto Copy yang disyahkan*)
4. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah (*Asli dan Foto Copy yang disyahkan*)
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dari POLRI (*Asli dan Foto Copy yang disyahkan*)
6. Daftar Riwayat Hidup sesuai Peraturan Badan Kepegawain Negara Nomor 1 Tahun 2019 (*Asli dan ditempel Photo*)
7. Surat Keterangan Pencari Kerja (AK/1) *Asli dan Foto Copy yang disyahkan*
8. Surat Pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 (*Asli dan bermaterai Rp. 6.000,-*)
9. Asli Bukti Registrasi Pendaftaran Online melalui situs (<https://sscn.bkn.go.id>)
10. Pas Photo ukuran 3x4 cm sebanyak 10 lembar

Keterangan :

- *Nomor urut 1 s.d 8 dibuat rangkap 2 (dua).*

PENJELASAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Kelengkapan Administrasi :

1. Surat Lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan untuk rangkap pertama ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (contoh format terlampir).
2. Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Anak Lampiran I-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy Ijazah/STTB.
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari POLRES setempat yang terbaru (Asli dan Foto Copy yang di legalisir).
4. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang terbaru (Asli dan Foto Copy yang di legalisir).
5. Surat Keterangan Pencari Kerja (AK/I) dari Dinas Ketenaga kerjaan setempat yang terbaru (Asli dan Foto Copy yang di legalisir).
6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah yang terbaru (Asli dan Foto Copy yang dilegalisir).
7. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019.
8. Surat Pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 (format terlampir)
9. Asli Bukti Registrasi Pendaftaran Online melalui situs (<https://sscn.bkn.go.id>)
10. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 lembar, baju warna putih dengan latar belakang merah dan tidak pakai kaca mata serta ditulis nama di belakang pas photo.
11. Semua berkas persyaratan yang ditentukan mulai dari nomor urut 1 s.d 9 dibuat dalam rangkap 2 (dua).
12. Berkas lamaran menggunakan stofmap :
Bagi formasi **tenaga guru** Warna Merah dan **tenaga penyuluh** Warna Biru.

Petunjuk Pengisian Data

1. Nama, Tempat dan Tanggal Lahir pada surat lamaran diisi sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah ditambahkan nama **Kota / Kabupaten**.
2. Alamat pada surat lamaran diisi lengkap sesuai dengan tempat tinggal menetap yang terakhir mulai dari Jalan, Nomor Jalan, Nama Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten.
3. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Nomor urut 8 dibuat atau diketik komputer dengan huruf Arial dan karakter huruf 12.
4. Keperluan yang tertulis dalam SKCK dan Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi NARKOBA adalah : **Usul pengangkatan menjadi PPPK**

ANAK LAMPIRAN I-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN
SURAT KETERANGAN SEBAGAI PENGGANTI/RALAT IJAZAH/STTB/YANG HILANG/
RUSAK/TERDAPAT KESALAHAN

NO	PENDIDIKAN	YANG MEMBUAT DAN MENANDATANGANI	YANG MENGESAHKAN/ MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1.	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA BAGIAN/ KABID/KASUBDIN/ YANG BERKOMPETEN ATAU YANG SETINGKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KABUPATEN/KOTA
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	PIMPINAN UNIVERSITAS/ INSTITUT YANG BERSANGKUTAN	DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	PIMPINAN SEKOLAH TINGGI YANG BERSANGKUTAN	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI DAN POLITEKNIK	PIMPINAN AKADEMI DAN POLITEKNIK YANG BERSANGKUTAN	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	PTS AGAMA ISLAM	REKTOR / KETUA / DIREK- TUR / DEKAN	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTAIS
6.	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/KHATOLIK	REKTOR/DEKAN/KETUA/ DIREKTUR BIMAS/URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/ KAKANDEP AGAMA KAB/KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7.	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/ AKDEMI PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/ KETUA/DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN, KAPUSDIKLAT/ KABID YANG BERKOMPETEN